

Pemkab Bogor Siap Jadi Tuan Rumah APKASI ke 22

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV peringatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan memperingati Hari APKASI ke-22, di Vimala Ballroom Hotel Pullman Vimala Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pada 18 Juni 2022 mendatang.

Kegiatan akan dikemas dengan kegiatan talk show dan konsolidasi organisasi mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.10 WIB.

Beberapa narasumber turut mengisi dan memerikan kegiatan Rakernas XIV APKASI Tahun 2022 yang akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. Muhammad Tito Karnavian. Menteri Koordinator Perekonomian,

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri ESDM.

Rencananya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan sebagai tuan rumah, Bupati Dharmasraya sekaligus Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan sebagai Sekretaris Jenderal APKASI akan hadir.

Rangkaian kegiatan konsolidasi organisasi terdiri dari Laporan Program Kerja APKASI Tahun 2021, Tentang isu aktual pemerintahan daerah, Program Kerja APKASI 2022, Perubahan Anggaran Dasar APKASI (Pasal 3 tentang kedudukan APKASI) dan rekomendasi Rakernas. ● **gio**

Akses Distribusi Hewan Ternak di Kota Bogor Diperketat

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperketat akses keluar dan masuk pendistribusian hewan ternak. Pengetatan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayahnya.

Selain memperketat jalur distribusi, Pemkot Bogor juga mendorong agar pemerintah pusat segera mengupayakan vaksinasi kepada hewan ternak, untuk mencegah penularan virus PMK di Kota Bogor yang semakin meluas. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan hal itu dilakukan imbas tujuh ekor sapi di RPH Bubulak Positif PMK. "Pasca ditemukannya kasus PMK di Kota Bogor, Pemkot Bogor sudah melakukan isolasi RPH Bubulak," kata Dedie, Kamis (9/6).

Kemudian, sambung dia, Pemkot Bogor juga melakukan penyekatan jalur distribusi hewan ternak di enam titik. Terutama angkutan hewan yang datang dari luar Kota Bogor.

Penyekatan dilakukan dengan melibatkan Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dibantu Satpol PP, dan Dishub Kota Bogor.

"(Kami) sudah mengajukan agar Polresta Bogor Kota dan TNI bisa membantu keluar masuk angkutan hewan ternak menjelang Idul Adha," ucapnya.

Kedua, pihaknya juga sudah meminta DKPP untuk memonitoring dan pemantauan intensif di titik-titik penjualan hewan kurban di Kota Bogor. "Harus diperhatikan juga hewan kurban harus memiliki syarat kesehatan yang dianjurkan oleh Dinkes kota Bogor. Jadi kita menyiapkan, dan juga dokumentasinya. Hewan yang sehat dan persyaratannya sudah ditetapkan Pemkot Bogor," imbuhnya.

Kendati demikian, Dedie meminta agar masyarakat Kota Bogor tidak perlu menunjukkan ketakutan secara berlebihan dengan adanya temuan kasus PMK. Namun Pemkot Bogor tetap mengupayakan hewan ternak yang sehat bagi manusia, serta sebat untuk hewan lain.

"Dan untuk memastikan itu. Dinas kita sudah mencoba mengeliminir permasalahan yang mungkin timbul, dan mengakibatkan jatuhnya banyak hewan yang terkena PMK," ujarnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

AKSI KEPRIHATINAN NELAYAN

Sejumlah pengunjjukrasa yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu melakukan aksi Keprihatinan di depan gedung DPRD Indramayu, Jawa Barat, Kamis (9/6). Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Pemerintah terkait PP nomer 85 tahun 2021 tentang tarif PNBPA Pasca Produksi, Wilayah Penangkapan Perikanan, dan kenaikan harga solar industri.

Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bogor Dikhawatirkan Terlambat

BOGOR (IM) - DPRD Kota Bogor khawatir akan terjadi keterlambatan pengerjaan gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Bogor di eks gedung DPRD Kota Bogor, Komplek Balai Kota Bogor.

Menurut Anggota Komisi DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhti atau yang akrab disapa Gus M, keterlambatan ini bisa terjadi karena beberapa variabel, salah satunya masalah administrasi.

"Seperti contoh pada pekerjaan tahap 1, ada adendum pekerjaan. Nah ini bisa saja membuat keterlambatan. Untuk tahap 2, kita lihat ada penurunan harga penawaran yang signifikan yang ditawarkan sama penyedia jasa. Kita khawatir akan ada adendum lagi," ujar Gus M, kemarin.

Jika melihat laman LPSE Kota Bogor, pagu anggaran untuk proyek Perpusda Kota Bogor ini senilai Rp 10 miliar. Namun berdasarkan hasil tender, pengajuan proyek menjadi Rp 8 miliar. Hal ini pun menjadi perhatian khusus dari Gus M.

Berdasarkan laporan awal dari Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor, proyek yang sudah dikerjakan sejak Mei ini ternyata baru mencapai 5 persen pengerjaan. Hal ini pun, kata Gus M, menjadi perhatian dari Komisi I DPRD Kota Bogor. Lantaran pembayaran

proyek dinilai terlalu menguntungkan pihak kontraktor, tanpa adanya kepastian kualitas proyek. "Oleh karena itu, Dinas dan konsultan pengawas harus melakukan pengawasan berkala karena kita khawatir akan ada penurunan kualitas bangunan," tegas Gus M.

Apalagi, kata dia, berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Dinas, para penyedia jasa sudah mencairkan anggaran uang muka 20 persen dari nilai kontrak. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menyoroti perihal tahapan administrasi dan pengerjaan proyek yang memiliki nilai Rp 23 miliar. Hal tersebut terjadi dikarenakan saat menggelar sidang beberapa waktu lalu, Komisi I DPRD Kota Bogor menemui adanya pekerjaan pemasangan keramik, padahal seharusnya pengerjaan di tahun ini berfokus kepada pengerjaan interior.

"Oleh karena itu kami menanyakan laporan tender, SPK dan dokumen kontrak. Karena terkait masih pengerjaan keramik dan lain-lain dalam gedung, kan di tahun ini harusnya pengadaan untuk interior. Jadi kami ingin mengetahui lebih detail dokumen perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan supaya lebih jelas dan terukur," katanya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PAMERAN UMKM OLAHAN IKAN

Peserta memperlihatkan produknya yang dipamerkan pada pameran Produk Olahan Ikan di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (9/6). Pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) olahan ikan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah tersebut guna mendongkrak serapan produk olahan ikan yang menurun akibat pandemi COVID-19.

Jemaah Haji Embarkasi Surabaya Kedapatan Bawa Joran Pancing dan Uang Rp150 Juta

Petugas Asrama Haji Embarkasi Surabaya menemukan benda-benda terlarang di dalam koper jemaah. Barang-barang yang ditemukan antara lain cobek, beras di atas 5 Kg, palu, joran pancing, gunting, silet, paku, hingga uang Rp150 juta.

SURABAYA (IM) - Jemaah calon haji (JCH) dari berbagai daerah di Jawa Timur terus berdatangan ke Asrama

Haji Surabaya. Di antara para jemaah, ada yang membawa benda tidak biasa. Petugas Asrama Haji Em-

barkasi Surabaya menemukan benda-benda itu dalam koper jemaah. Barang-barang yang ditemukan antara lain cobek, beras di atas 5 Kg, palu, joran pancing, gunting, silet, paku, hingga uang Rp150 juta.

Barang seperti paku, palu, gunting, silet ini ditemukan petugas di dalam koper milik jemaah calon haji asal Lamongan.

Petugas juga menemukan uang sebesar Rp150 juta yang terbungkus dalam jeriken dan diisi dengan beras, milik jemaah asal Tulungagung. Pemilik koper mengaku uang itu merupakan milik 5 jemaah yang tergabung dalam satu KBHI.

Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Husnul Maram selaku Ketua PPIH Embarkasi Surabaya menjelaskan, uang yang berada dalam koper jemaah kemudian diperiksa lebih lanjut oleh Petugas Bea Cukai PPIH Embarkasi Surabaya.

"Oleh petugas, uang tersebut dihitung, dan total jumlahnya ada 150 juta rupiah," tuturnya, Kamis (9/6).

Maram menjelaskan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia no :

4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan tata cara membawa uang rupiah keluar dan masuk wilayah pabeaan Republik Indonesia, maka setiap orang yang membawa keluar negeri uang tunai rupiah lebih besar dari Rp100 juta harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

"Karena jumlah uang tunai yang dibawa jemaah haji kloter

9 ini di atas 100 juta, maka tadi oleh petugas dibuatkan surat pengantar untuk bisa membawa uang tersebut ke Arab Saudi," tutur Maram.

Selain ditemukannya uang dalam koper jemaah, petugas juga masih menemukan koper yang overweight atau kelebihan beban.

"Masih banyak koper yang kelebihan berat dan harus dibongkar dikurangi isinya," sambungny.

Kelebihan berat koper jemaah sebagian besar didominasi bahan makanan, seperti mi instan, kacang hijau, sugu mutiara, kacang sambel dan lainnya.

Ia menyebut, untuk barang-barang lainnya yang ditemukan, akan diamankan petugas haji dan dibawa pulang ke daerah masing-masing. Barang itu bisa diambil kembali oleh si pemilik sekembalinya dari Tanah Suci di kantor Kemenag kabupaten/ kota setempat.

"Cobek ga boleh dibawa di dalam kabin pesawat. Takutnya kan, bila ada apa-apa, barang-barang seperti cobek disalahgunakan untuk melempar atau tindakan anarkis lainnya dalam pesawat, kan berbahaya," tutur Maram. ● **pra**

PPKM Pemkab Bogor Turun ke Level 1

CIBINONG (IM) - Status Covid-19 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor turun level dari sebelumnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 menjadi level 1. Hal ini sesuai Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/181/Kpts//Per-UU/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bogor.

PPKM level 1 diberlakukan melihat situasi penanganan kasus Covid yang semakin terkendali. PPKM level 1 ini berlaku mulai tanggal 7 Juni hingga 4 Juli 2022. Sejumlah aturan kembali dilonggarkan di antaranya :

Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindung pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer), kapasitas maksimal 100% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan

kepada masyarakat, serta 75% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindung dan kapasitas maksimal 100%, serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan.

Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 100% maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas pengunjung 100%.

Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100%.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum: warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kes-

ehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempati 100% dari kapasitas.

Restoran/rumah makan, kafe diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan kapasitas maksimal 100%.

Khusus restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, dengan kapasitas maksimal 100%.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 100% pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 100% kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% dengan menerapkan protokol kesehatan. ● **gio**



IDN/ANTARA

PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL

Sejumlah Lansia beryanyi saat mengikuti peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Balaikota Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/6). Dalam acara (HLUN) ke-26 tersebut, Pemerintah Kota Bandung sekaligus mendeklarasikan bahwa Kota Bandung sebagai kota ramah Lansia yang di bacakan oleh berbagai tokoh di Kota Bandung.